

Daftar Kepustakaan

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Albertin, Giorgia, Borianna Yontcheva, dan Dan Devlin, 2021, *Tax Avoidance in Sub-Saharan Africa's Mining Sector*, IMF Departmental Paper.
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP Buku, Surabaya.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2022, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mochammad Khusaini, 2019, *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, UB Press, Malang.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandarlampung.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pohan, C. A., 2021, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.

- Richardus Eko Indrajit, 2016, *Konsep dan Strategi Electronic Government*, Andi, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- Siti Resmi, 2019, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Van Wijk, H.D. dan Willem Konijnenbelt, 1995, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, 's-Gravenhage.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal, Artikel, dan Makalah

- Al Farisi, M. S., 2021, "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020", *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 21, No. 1.
- Arief HSB, M., dkk., 2018, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2.
- Choirunnisa, L., dkk., 2023, "Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia", *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 1.
- Christia, Adissya Mega dan Budi Ispriyarso, 2019, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 1.
- Dewi, Anggraini, dkk., 2017, "Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Pembangunan Nagari*, Vol. 2, No. 2.
- Dewi, C. M., 2025, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 5.
- Gedeona, Hendrikus T., "Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang", STIA LAN Bandung.

- Hasmita, dkk., 2020, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Latifa, A., Frinaldi, A., dan Roberia, R., 2024, "Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik", *Polyscopia*, Vol. 1, No. 3.
- Lekipiouw, S. H., 2020, "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan", *Jurnal SASI*, Vol. 26, No. 4.
- Luthviati, Resti Dian, 2020, "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 3.
- Manika, Agus Surya, dkk., 2024, "Hukum untuk Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dari Perspektif Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Tambang, Mineral, dan Batubara", Vol. 5, No. 3, Denpasar.
- Muwahid, M., 2017, "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Keadilan", Vol. 7, No. 1.
- Palias, G., dkk., 2023, "Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Lex Privatum*, Vol. 3.
- Philipus M. Hadjon, 1997, "Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih", Pidato Peresmian Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Nomor 5 & 6.
- Rahayu, D. P. dan Faisal, 2021, "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba", *Jurnal Pandecta*, Vol. 16, No. 1.
- Rusnan, Koynja, dan Nurbani, 2020, "Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak", *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Santoso, Budi, 2017, "Dinamika Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal: Antara Regulasi dan Realitas".
- Sidik, Machfud, 2002, "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal", Makalah disampaikan pada Seminar

Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Siregar, Wahyuni, 2025, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah dan Kemiskinan pada Pertumbuhan Ekonomi di Gorontalo", Universitas Samudera, Indonesia.

Sunaryo, S., 2022, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1.

Taurisa, Devi, 2020, "Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1.

Urmilasari, Evy, Andi M. Rusli, dan A. Lukman Irwan, 2013, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1.

Usdeldi, U., Fikri, A. S., dan Putri, I. J., 2024, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2.

Utami, N. E., 2023, "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara", *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 2.

Zamroni, Mohammad, 2024, "Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata", Vol. 36, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Kota Padang, *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

D. Sumber Lain

Direktorat Jenderal Pajak, "Fungsi Pajak", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://pajak.go.id/en/node/34273>, diakses April 2026.

Direktorat Jenderal Pajak, "Sistem Perpajakan", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.pajak.go.id/en/node/34276>, diakses April 2026.

Direktorat Jenderal Pajak, "Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia", <https://pajak.go.id/en/node/77758>, diakses April 2026.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, 2024, *Implementasi Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022*.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2021, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam RUU HKPD: Policy Note dan Daftar Inventarisasi Masalah*, diakses 10 Oktober 2025.

Ortax.org, "Ketentuan Terbaru Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan", <https://ortax.org/pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan>, diakses April 2026.

Wawancara dengan Al-Fachrur Rozy, Kepala Sub-bidang Pembukuan dan Pelaporan, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2026.

Wawancara dengan Edral Pratama, Kepala Bidang Pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2026.

